



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
20 S.D. 22 FEBRUARI 2020
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019-2020**

*
**

**
*

JAKARTA 2020



L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020-2021
20 S.D. 22 FEBRUARI 2020

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kunjungan spesifik adalah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, berdialog untuk mendapatkan masukan langsung dari pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra kerja Komisi IV DPR RI sehubungan dengan kondisi masyarakat dan kendala dari program serta pelaksanaan pembangunan sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pangan secara umum di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	NAMA	FRAKSI
1.	A-151	SUDIN, S.E.	KETUA KOMISI IV/F.PDIP
2.	A-220	Ir. MINDO SIANIPAR	ANGGOTA/F.PDIP
3.	A-171	ONO SURONO, S.T.	ANGGOTA/F.PDIP
4.	A-193	VITA ERVINA, S.E., M.B.A.	ANGGOTA/F.PDIP
5.	A-230	Drs. I MADE URIP, M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
6.	A-265	H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.	ANGGOTA/F.PG
7.	A-292	Ir. ICHSAN FIRDAUS	ANGGOTA/F.PG
8.	A-303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	ANGGOTA/F.PG
9.	A-129	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.	ANGGOTA/F.GERINDRA
10.	A-356	FAUZI H. AMRO, M.Si.	ANGGOTA/F.NASDEM
11.	A-378	H. CHARLES MEIKYANSYAH	ANGGOTA/F.NASDEM
12.	A-53	EDWARD TANNUR, S.H.	ANGGOTA/F.PKB
13.	A-415	Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.,	ANGGOTA/F.PD
14.	A-451	H. JOHAN ROSIHAN, S.T.	ANGGOTA/F.PKS
15.	A-457	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M.	ANGGOTA/F.PKS
16.	A-508	SLAMET ARYADI, S.Psi.	ANGGOTA/F.PKS
17.	A-464	K. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDI	ANGGOTA/F.PPP

D. WAKTU DAN TEMPAT

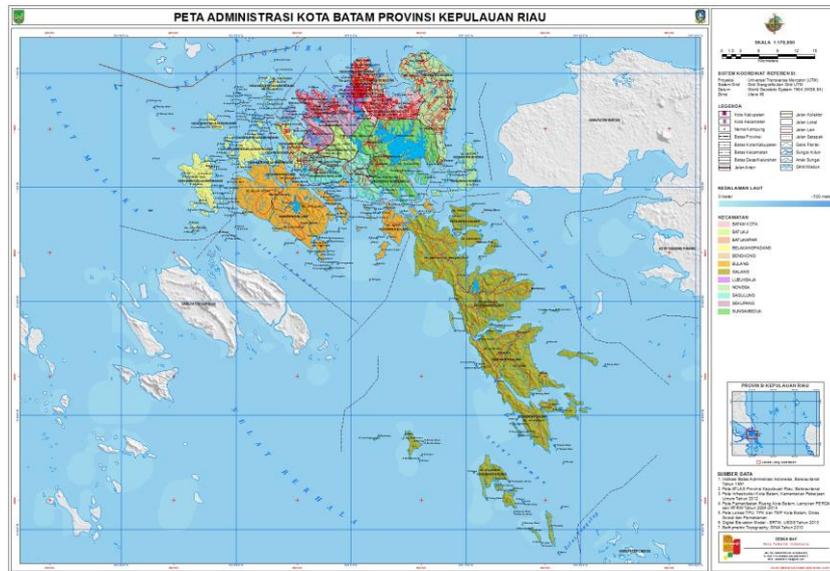
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2020.

E. KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan harga bahan pangan di Pasar Toss 3000, Jl. Jodoh Kota Batam;
2. Melakukan peninjauan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Jl. Bareleng Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam; dan
3. Melakukan peninjauan alih fungsi hutan lindung Sei Hulu Lanjai Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam.

F. GAMBARAN UMUM KOTA BATAM



Gambar: Peta Kota Batam
(Dok. Google Peta Kota Batam)

Luas wilayah Kota Batam adalah 426,463.28 ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Singapura dan Malaysia.

Sebelah Selatan: Kabupaten Lingga.

Sebelah Barat: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional.

Kondisi Sosial-Budaya dan Ekonomi

Laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahun selama periode 2000-2013 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata 8 persen. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Kegiatan Perekonomian Perekonomian Kota Batam setiap tahun relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 mencapai 7,20 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, wilayah ini dijadikan

sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakan nadi perekonomian Kota Batam meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, serta sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain.

Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan. Namun pada tanggal 17 September 2019 berakhirnya pemerintahan dualisme, sehingga Badan Pengusaha Batam diberikan kepada Pemerintahan Walikota Batam berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam, dan lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garment, industri plastik, dan

lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (*Indonesia Free Trade Zone*) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dimana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan Pajak Tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%.

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Peninjauan Harga bahan Pangan di Pasar Toss 3000 Jl. Jodoh Kota Batam

Terdapat beberapa komoditas dengan harga per kilogram yang masih tinggi yaitu, Cabe Merah Kriting Rp35.000,00, Cabe Merah Kriting Jogja Rp40.000,00, Cabe Hijau Kriting Rp28.000,00, Caber Rawit Merah (Rawit Setan) Rp75.000,00, Cabe Rawit Hijau Rp36.000,00, Bawang Putih Bonggol Rp35.000,00, Bawang Merah Rp28.000,00, Bawang Bombay Merah India Rp16.000,00, Bawang Bombay Rp15.000,00, dan Wortel Rp11.000,00.

Tabel 1. Alokasi APBN Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2017-2020 di Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROPINSI/KAB/KOTA	TA. 2017			TA. 2018			TA. 2019			TA. 2020					
		KOMODITAS	VOLUME (HA)	ANGGARAN (RP.000)	KOMODITAS	VOLUME (HA)	ANGGARAN (RP.000)	KOMODITAS	VOLUME (HA)	ANGGARAN (RP.000)	KOMODITAS	VOLUME (HA)	ANGGARAN (RP.000)			
1	Kota Batam	Cabai Besar	30	900,000	Cabai Besar	15	446,250	Cabai Besar	20	260,000	Cabai Besar	40	180,000			
		Bawang Merah	10	400,000	Bawang Merah	10	400,000	Bawang Merah (Umbi)	20	380,000	Bawang Merah	25	725,000			
								Bawang Merah (Biji)	5	95,000	Sayuran	20	260,000			
								Sayuran	20	260,000						
TOTAL			40	1,300,000		-	25	846,250		-	65	995,000		-	65	905,000
2	Kab. Bintan	Cabai Besar	30	900,000	Cabai Besar	20	595,000	Cabai Besar	20	260,000	Cabai Besar	50	225,000			
		Bawang Merah	10	400,000	Bawang Merah	10	400,000	Bawang Merah (Umbi)	20	380,000	Bawang Merah	20	580,000			
		Pete (apbn-P)	50	375,000				Bawang Merah (Biji)	5	95,000	Sayuran	20	260,000			
		Jengkol (APBN-P)	50	375,000				Sayuran Daun	10	80,000						
TOTAL			140	2,050,000		-	30	995,000		-	55	815,000		-	90	1,065,000
3	Kab. Karimun	Jengkol (APBN-P)	25	187,500	Bawang Merah	10	400,000				Cabai Besar	40	180,000			
		TOTAL			25	187,500		-	10	400,000		-	-		-	40
4	Kab. Lingga	Pete (apbn-P)	100	750,000	Cabai Besar	15	446,250	Cabai Besar	40	520,000	Cabai Besar	40	180,000			
		Jengkol (APBN-P)	100	750,000	Bawang Merah	20	800,000	Sayuran	15	195,000						
TOTAL			200	1,500,000		-	35	1,246,250		-	55	715,000		-	40	180,000
5	Kab. Kep. Anambas	Jengkol (APBN-P)	20	150,000	Cabai Besar	15	446,250				Cabai Besar	20	90,000			
		TOTAL			20	150,000		-	15	446,250		-	-		-	20
6	Kab. Natuna				Bawang Merah	5	200,000									
		TOTAL			-	-		-	5	200,000		-	-		-	-
TOTAL			425	5,187,500		-	120	4,133,750		-	175	2,525,000		-	255	2,420,000

Tabel 2. Data LT, LP, dan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN	LUAS TANAM BARU (HA)				LUAS PANEN (HA)				PRODUKSI (HA)			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
KARIMUN	2	4	0	0	4	0	0	0	143	0	0	0
BINTAN	20	2	5	0	15	1	0	0	613	2	0	0
NATUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINGGA	4	0	0	0	4	0	0	0	140	0	0	0
KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANAMBAS													
B A T A M	2	0	4	0	1	1	2	0	50	10	10	0	
TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 3. Data Kebutuhan, Produksi, dan Neraca Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Provinsi	JANUARI 2020 (Ton)			FEBRUARI 2020 (Ton)			MARET 2020 (Ton)			APRIL 2020 (Ton)			MEI 2020 (Ton)		
		Kebutuhan	Produksi	Neraca	Kebutuhan	Produksi	Neraca	Kebutuhan	Produksi	Neraca	Kebutuhan	Produksi	Neraca	Kebutuhan	Produksi	Neraca
1	KEPULAUAN RIAU	1,153	38	-1,115	1,159	10	-1,149	1,167	1	-1,166	1,179	1.76	-1178	1,224	1.6	-1223

KABUPATEN	PROGNOSA PRODUKSI 2020 (TON)	PROGNOSA KEBUTUHAN 2020 (TON)	NERACA (TON)	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN (%)
KARIMUN	15	1,448	-1,432	1.06
BINTAN	62	1,165	-1,103	5.36
NATUNA	-	393	-393	0.00
LINGGA	1	552	-551	0.19
KEPULAUAN ANAMBAS	-	248	-248	0.00
B A T A M	6	8,847	-8,841	0.06
TANJUNG PINANG	-	1,320	-1,320	0.00

Tabel 4. Harga Eceran Rata-rata Bawang Merah Tahun 2019



Tabel 1.6a. Perkembangan rata-rata tahunan harga eceran bawang putih di ibukota provinsi, 2015 - 2019

Rp/kg

No.	Nama Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019*)	
1	Banda Aceh	19,108	35,455	33,564	27,813	33,568	20.94
2	Medan	19,370	33,174	29,383	24,396	30,323	16.79
3	Padang	19,272	32,100	30,315	22,021	29,682	17.11
4	Pakanbaru	18,944	32,148	29,214	22,967	29,486	16.89
5	Jambi	18,489	31,510	28,447	22,263	30,205	18.66
6	Palembang	20,160	33,840	34,318	30,021	37,295	20.25
7	Bengkulu	21,379	37,282	34,388	25,804	30,523	14.99
8	Bandar Lampung	17,628	30,825	28,621	22,688	29,750	19.53
9	Jakarta	21,279	36,277	37,393	37,800	44,514	23.10
10	Bandung	19,606	36,318	36,483	30,625	36,500	22.21
11	Semarang	20,553	33,425	33,690	27,417	35,841	18.88
12	Yogyakarta	20,319	33,278	35,113	27,333	35,409	19.17
13	Surabaya	16,728	31,513	31,440	27,125	36,341	27.10
14	Denpasar	17,460	31,382	28,749	20,708	28,045	19.70
15	Mataram	18,010	31,884	29,883	21,854	29,318	19.51
16	Kupang	24,833	39,204	42,981	30,833	39,773	17.06
17	Gorontalo	23,228	38,070	38,864	32,100	40,682	18.83
18	Pontianak	19,478	33,967	31,110	21,425	27,227	15.48
19	Palangkaraya	20,202	36,530	33,859	26,500	32,932	19.01
20	Banjarmasin	19,013	34,255	30,063	24,292	30,909	18.99
21	Samarinda	20,917	36,059	32,527	25,792	36,364	20.72
22	Manado	24,218	40,880	37,844	29,083	32,841	12.79
23	Palu	21,576	37,859	34,743	27,588	34,614	18.03
24	Makassar	17,729	31,134	35,728	24,542	29,477	19.79
25	Kendari	23,567	39,901	38,423	32,813	39,841	18.11
26	Ambon	22,170	36,592	37,053	30,708	33,636	14.68
27	Jayapura	28,186	40,801	45,762	36,138	43,945	14.37
28	Banten	19,671	34,145	31,540	27,063	32,227	17.71
29	Bangka Belitung	18,992	33,215	32,129	24,813	30,273	17.71
30	Maluku Utara	28,783	47,923	48,154	29,083	32,841	10.07
31	Mamuju	20,482	34,258	33,207	25,583	33,841	18.38
32	Manokwari	28,915	45,242	48,641	38,958	46,136	15.62
33	Tanjung Pinang	21,064	35,650	34,266	27,250	30,091	13.83
34	Tanjung Selor	27,193	43,340	37,240	29,292	35,527	11.31
Nasional		20,949	35,639	34,667	27,708	34,505	17.96

Sumber : 2015 s/d 2017 Data dari Kementerian Perdagangan, 2018 s/d November 2019 dari BI diolah oleh Pusdatin Kementan

Keterangan : *) Rata-rata s/d November 2019

Peninjauan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Jl. Barelang Kel Setokok, Kec Bulang kota Batam

Dalam kunjungan kerja spesifik ini rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI yakni Sudin, S.E. bersama PLT/Dirjen PSDKP Nilanto Perbowo menuju pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam. Adapun kendala/masalah yang didapatkan adalah:

1. Kendala/masalah yang dihadapi oleh Dermaga Pangkalan PSDKP Batam saat ini dipenuhi oleh kapal *illegal fishing* yang masih menjalani upaya hukum banding dan kasasi dan kapal titipan dari kejaksaan yang telah selesai kasusnya;
2. Keterbatasan kapasitas rumah penampungan sementara ABK *non justitia* pada saat tertangkapnya kapal *illegal fishing di adhoc*;
3. Kesejahteraan bagi awak kapal/kru kapal pengawas masih sangat minim;
4. Kapal pengawas atau armada sudah lama beroperasi serta persenjataannya yang sudah tidak layak pakai untuk kondisi terdesak atau tertentu di lapangan (*on combat*), maka diperlukan pembelian ataupun pengadaan kapal/armada pengawas serta sumber daya pendukungnya (senjata dan amunisi); dan
5. Penggunaan teknologi masih minim perlu ditingkatkan, baik teknologinya maupun sumber daya manusia yang menggunakannya.

Komisi IV DPR RI memberikan dukungan yakni berupa:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen PSDKP untuk menguatkan anggaran karena tantangan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia semakin besar. Untuk itu, diperlukan dukungan yang kuat terutama armada kapal pengawas, hari layar pengawasan, baik di laut maupun di udara, serta teknologi persenjataan dan penggunaan satelit (AIS, VMS) dalam mengawasi pencurian ikan di perairan Indonesia; dan
2. Komisi IV DPR RI meminta agar anggaran kesejahteraan bagi awak ataupun kru kapal pengawas ditingkatkan.



Gambar 1. Rombongan Komisi IV DPR RI bersama PLT Dirjen PSDKP berfoto dengan Awak/kru Kapal Pengawas di Pangkalan PSDKP Kota Batam.

Peninjauan Alih Fungsi Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam

Komisi IV DPR RI melihat kondisi hutan lindung didampingi oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari pantauan di lapangan ternyata hutan lindung sudah berubah menjadi rata dan penuh aktivitas pembangunan perumahan dan ruko, dari kondisi tersebut rombongan Komisi IV DPR RI menyimpulkan bahwa:

1. Komisi IV DPR RI menilai bahwa ini sudah dalam katagori pelanggaran hukum dan akan menyegel seluruh alat berat yang ada seperti 3 ekskavator dan 7 truck berukuran besar; dan
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak secara tegas pelanggar berdasarkan undang-undang yang ada.

Rombongan Komisi IV DPR RI bersama dengan Dirjen Gakkum juga mengamankan salah satu petinggi dari perusahaan dan sudah mengantongi nama-nama perusahaan di antaranya adalah PT Kayla Alam Sentosa (PT KAS), PT Alif Mulia Jaya Batam (PT AMJB) dan PT Prima Makmur Batam (PT PMB).



Gambar 2. Rombongan Komisi IV DPR RI bersama dengan Dirjen Gakkum melakukan penyegelan terhadap alat berat dan truck yang beraktivitas di lokasi hutan lindung Kota Batam.

H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran secara umum di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2021;
2. Komisi IV DPR RI mendorong anggaran yang digunakan oleh PSDKP saat ini lebih kepada kesejahteraan awak kapal pengawas;
3. Komisi IV DPR RI mendorong Dirjen PSDKP untuk terus meningkatkan kuantitas armada kapal pengawas, hari layar, serta penggunaan teknologi dalam menjalankan tupoksinya;
4. Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Gakkum untuk menindak tegas dan menegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sesuai perundangan yang berlaku; dan
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan peninjauan ke pasar pada saat Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

I. PENUTUP

Terhadap beberapa aspirasi yang didapatkan selama kunjungan kerja spesifik di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dengan menyampaikan, baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Jakarta, Februari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

